

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan infrastruktur kota dan pembangunan daerah dan desa semakin seimbang dan serasi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sebagai lokomotif pembangunan nasional juga berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan dasar. Program Dana Desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan juga sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah.

Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan momentum untuk meningkatkan otonomi desa dimana juga UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang tercakup dalam perogram Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan persarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan

sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partipasi masyarakat secara langsung.¹

Joko Tri Haryanto menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kredibel mendorong pembangunan infrastruktur, memasuki Tahun 2017 pemerintah akan melanjutkan berbagai percepatan program-program pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pada tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun ini sedianya akan dibangun jalan sepanjang 815 km, jembatan sepanjang 9.399 km, pembangunan sekaligus penyelesaian 13 bandara, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi, jalur kereta api tahap I dan lanjutannya, serta modernisasi terminal penumpang di tiga lokasi lanjutan.²

¹Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hal.110

²Joko Tri H. *APBN Kredibel yang mendorong Pembangunan Infrastruktur*, dalam Media Keuangan, volume XII/No.116/Mei 2017 hal .41

Pembangunan infrastruktur guna mendorong pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Desa untuk meningkatkan daya saing berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Indonesia mampu meningkatkan daya saing infrastruktur global tercermin dari data indeks daya saing global untuk Indonesia yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) yang terus meningkat dari peringkat 82 Tahun 2014 kemudian pada tahun 2015 peringkat ke 72, menyusul peringkat 62 Tahun 2016 dan peringkat 60 Tahun 2017.³

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan di pulau Jawa sebagai wilayah terbangun tidak terkecuali di Provinsi Jawa Timur, secara administrasi terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Surabaya sebagai Ibukota Provinsi. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai Provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten dan Kota terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Timur terdiri dari empat Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) yaitu wilayah Madiun, wilayah Bojonegoro, wilayah Malang dan wilayah Pamekasan.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari pembangunan Kabupaten dan Kota, salah satunya Kabupaten Magetan merupakan wilayah yang sedang berkembang terdiri dari 18 Kecamatan dan 207 Desa, peningkatan infrastruktur desa di Kabupaten Magetan dilakukan melalui program optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD) sehingga dapat membangun desa baik sarana prasarana secara

³Eduardo S. *Gencar Bangun Infrastruktur, Jokowi Genjot Pertumbuhan Ekonomi RI*. <http://m.detik.com>, diakses 06 Desember 2017

bersamaan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi desa di seluruh Kabupaten Magetan.

Program pembangunan infrastruktur dimulai dari lingkup daerah hingga desa. Pemerintah menggelontorkan anggaran Dana Desa (DD) untuk memulai membangun desa melalui kegiatan yang produktif. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) untuk membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan dan talud atau plengsengan. Penggunaan Dana Desa (DD) secara optimal pada bidang pembangunan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa yang beriringan dengan pergerakan perekonomian perkotaan melalui terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana.

Pemberian Dana Desa (DD) pada setiap desa untuk membangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diberikan sejak tahun 2015, menggantikan program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan sebagai desa yang telah mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dengan baik atas rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) dan tenaga pendamping desa Kabupaten

Magetan. Desa Ginuk sebagai Desa tertib administrasi ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan Dana Desa (DD) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang telah sesuai dengan intruksi pemerintah Kabupaten Magetan.

Desa Ginuk Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan merupakan salah satu dari 11 Desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ditinjau dari segi administratif Desa Ginuk memiliki batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara Desa Robahan, sebelah Timur Desa Wates, sebelah Selatan Desa Sumberjo dan sebelah Barat Desa Kasren. Desa Ginuk.

Desa Ginuk Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan mengelola Dana Desa (DD) dengan baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan yang baik. Bidang pelaksanaan pembangunan desa melaksanakan pembangunan plesengan atau talud, jalan paving, jalan makadam, jembatan, pembangunan bendungan air, sanitasi lingkungan, pengadaan alat kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna, pembangunan perpustakaan desa, sistem informasi desa.

Pembangunan Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan setelah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Dusun hingga tingkat Desa untuk menampung usulan masyarakat serta usulan kebutuhan pembangunan fisik desa. Usulan yang diterima dan disetujui melalui musyawarah akan dijadikan program kerja pemerintah desa, sedang usulan yang tidak diterima dapat di usulkan di tahun yang akan datang.

Pembangunan fisik diharapkan terus memberikan sumbangsuhnya untuk meningkatkan sarana prasarana penggerak roda perekonomian, seperti adanya perbaikan jalan, jembatan, pembangunan jalan paving yang dapat memudahkan konektivitas antar wilayah baik desa maupun luar desa. Pembangunan fisik yang memadai tentu dapat menunjang potensi pasar desa, dikembangkan supaya dapat meningkatkan pendapatan desa serta sebagai wadah masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Wilayah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang luas dengan masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, mampu menghasilkan padi sebagai komoditas utama.

Sarana prasarana fisik melalui pemanfaatan Dana Desa (DD) bagi Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dianggap penting sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan desa melalui hasil musyawarah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang akan di tindak lanjuti dalam pelaksanaan pembangunan serta menjadi acuan dalam mengoptimalkan program pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan**

NO	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pembangunan Talud	Pembangunan Talud
2	Pembangunan Jalan Paving	Pembangunan dan perbaikan jalan Paving
3	Pembangunan Jalan Rabat	Pembangunan dan perbaikan

		jalan rabat
4	Pembangunan Bendungan Air	Pembangunan irisagi
5	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan
6	PMT (Pemberian Makanan Tambahan) posyandu balita dan Lansia	PMT (Pemberian Makanan Tambahan) posyandu balita dan Lansia
7	Pembangunan Gedung TK	Pembangunan gedung TK dan PAUD

Sumber: Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 dan 2019

Pelaksanaan pembangunan infrstruktur di Desa Ginuk Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan telah terlaksana dengan baik, penggunaan Dana Desa (DD) diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata, hal ini juga di atur dalam Islam untuk melakukan pendistribusian pembangunan maupun pendapatan guna mencapai kemaslahatan umat.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat menjadi hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin melakukan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi Dana Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana Kontribusi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimana Kontribusi Dana Desa dalam pembangunan Fisik infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
4. Bagaimana Kontribusi Dana Desa dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
5. Bagaimana Kontribusi Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengkaji Kontribusi Dana Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?

2. Mengkaji Kontribusi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
3. Mengkaji Kontribusi Dana Desa dalam Kualitas pembangunan Fisik infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
4. Mengkaji Kontribusi Dana Desa dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ?
5. Mengkaji Kontribusi Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini mengacu pada peningkatan perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi pembangunan fisik (pembangunan jalan paving, pembangunan *drainase* atau saluran air, pembangunan *talud* atau penyangga jalan, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan makadam) Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dalam menunjang perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan di pasar desa, melalui optimalisasi anggaran Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur secara merata dan meningkatkan mobilitas sosial serta pertukaran ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk manfaat akademik maupun manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Ekonomi Syariah serta sebagai referensi kepustakaan mengenai pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang perekonomian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peran pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan program pemerintah, menciptakan pembangunan infrastruktur desa yang bermanfaat bagi penunjang perekonomian masyarakat sebagai salah satu usaha bersama membangun jantung ekonomi nasional.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk memudahkan memahami sebuah definisi, melalui tinjauan definisi konseptual yang bersumber dari teori para tokoh dan definisi operasional yang telah dibuat oleh peneliti dengan acuan judul dan teori, sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

- a) Peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaikkan, mempertinggi, memperhebat.

Peningkatan merupakan proses untuk merubah ke arah yang lebih baik.

- b) Infrastruktur menurut Grigg merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.⁴
- c) Perekonomian menurut Dumairy merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan.
- d) Desa menurut undang-undang No.5 tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

2. Definisi Operasional

- a) Peningkatan adalah kemajuan menjadi sebuah target dalam suatu pencapaian, proses dan kerja keras dapat memberikan

⁴MA Cakrawijaya. *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan*. (eprints.undip.ac.id : 2013) hal 8

⁵Rosfa Nur A. *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa melalui program pemberdayaan masyarakat dalam prespektif ekonomi Islam*. (UIN Raden Intan Lampung : 2017)

hasil yang memuaskan, sehingga mampu ke taraf yang lebih tinggi.

- b) Infrastruktur adalah pembangunan fisik yang diperuntukkan untuk publik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara merata, dengan melaksanakan mulai dari tingkat desa, daerah hingga tingkat pusat.
- c) Perekonomian adalah aturan, pengawasan dan pengendalian dalam menjalankan roda ekonomi dengan sungguh-sungguh sehingga mampu merubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal : Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi

BAB II: Kajian pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis.

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan

BAB VI: Penutup, terdiri dari: kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran. Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.